

TERBUKA

**RISALAH SIDANG TAHUNAN MPR RI
DAN SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI
Jumat, 14 Agustus 2020**

Nomor : 53/RISALAH/VIII/2020



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RISALAH SIDANG TAHUNAN MPR RI
DAN SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI**

I. Keterangan:

- Hari : Jumat
- Tanggal : 14 Agustus 2020
- Waktu : 09:10 WIB – 10:40 WIB
- Tempat : Gedung Nusantara, Jakarta
- Pimpinan Sidang : 1. H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A. (Ketua MPR RI)
2. Dr. (HC) Puan Maharani (Ketua DPR RI)
3. Ir. AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI)
- Sekretaris Rapat : 1. Dr. Maruf Cahyono, S.H., M.H. (Sekjen MPR RI)
2. Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekjen DPR RI)
3. Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M. (Sekjen DPD RI)
- Acara 2020 : 1. Sidang Tahunan MPR RI Dalam Rangka Sidang Tahunan Tahun
2020
2. Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI
- Agenda : Mendengar Pidato Presiden Republik Indonesia
- Hadir : Secara Fisik : 173 Anggota
Secara Virtual : 349 Anggota
- Tidak Hadir : 189 Anggota

II. Jalannya Rapat:

1. Pembawa Acara

Hadirin dimohon berdiri Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia Didampingi Ketua MPR, Ketua DPR, Dan Ketua DPD Memasuki Ruang Sidang Paripurna.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Mengheningkan Cipta Dipimpin Oleh Ketua MPR.

2. Pimpinan Sidang : H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A. (Ketua MPR RI)

Saudara-saudara sekalian, marilah sejenak kita menundukan kepala seraya berdoa kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga pahlawan bangsa yang telah mendahului kita mendapat tempat yang layak di sisi-Nya dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya.

Mengeningkan cipta dimulai.

Mengheningkan Cipta

Selesai.

3. Pembawa Acara

Hadirin disilakan duduk kembali.

4. Pimpinan Sidang : H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A. (Ketua MPR RI)

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Namu Buddhaya. Salam Kebajikan.

Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia, Saudara Ir. H. Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Prof. DR. K.H. Ma'ruf Amin. Presiden

Republik Indonesia Kelima, Ibu DR. Honoris Causa Megawati Sukarnoputri. Wakil Presiden Republik Indonesia keenam, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Try Sutrisno. Wakil Presiden Republik Indonesia kesembilan, Bapak DR. H. Hamzah Haz, M.A., Ph.D. Wakil Presiden Republik Indonesia kesebelas, Bapak Prof. DR. Boediono.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Saudara DR. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Saudara La Nyala Mahmud Mattalitti.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Saudara DR. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si., CSFA. Ketua Mahkamah Agung, Saudara DR. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. Ketua Mahkamah Konstitusi, Saudara DR. Anwar Usman, S.H., M.H. Ketua Komisi Yudisial, Saudara DR. H. Jaja Ahmad Jayus.

Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, DR. Ahmad Basarah, M.H., dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. H. Ahmad Muzani, dari Fraksi Partai Gerindra. Lestari Moerdijat, S.S., M.M., dari Fraksi Partai NasDem. DR. H. Jazilul Fawaid, SQ.,M.A., dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. DR. H. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A., dari Fraksi Partai Demokrat. DR. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. DR. (HC) Zulkifli Hasan, S.E., M.M., dari Fraksi Partai Amanat Nasional. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dan, Prof. DR. Ir. Fadel Muhammad, dari Kelompok DPD.

Para Pimpinan Lembaga-lembaga Negara, para Anggota MPR, DPR, dan DPD RI, para Menteri Koordinator Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan KAPOLRI, para Ketua Umum Partai Politik, Para insan pers media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para tamu undangan dan yang teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia.

Sesuai catatan daftar hadir yang disampaikan Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir 161 Anggota dan kehadiran virtual 274 Anggota yang diundang hadir baik fisik maupun virtual yang telah menandatangani daftar. Serta, Anggota MPR/DPR/DPD RI lainnya hadir secara virtual dari tempatnya masing-masing. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Peraturan Tata Tertib MPR, Pasal

281 ayat (1) dan Pasal 254 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPR RI, serta Pasal 264 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPD RI, Sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dengan agenda mendengarkan Pidato Presiden dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Ketuk Palu 1X

Sidang Dibuka Pukul: 09:30 WIB

Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan, sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas konstitusional kita masing-masing, melaksanakan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Rasa syukur yang mendalam juga patut kami persembahkan, di tengah tengah keprihatinan kita bersama menghadapi bencana nasional Pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita masih dapat melaksanakan agenda penting kenegaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, meskipun dengan segala kesederhanaan dan keterbatasan.

Namun demikian, Kami yakin bahwa keterbatasan dalam penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, tidaklah akan mengurangi semangat kenegarawanan kita semua, untuk terus bergotong royong, membangun kebersamaan, dan persatuan di atas pondasi nilai-nilai luhur bangsa, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Untuk itu, izinkan kami dari meja Pimpinan Sidang, mengungkapkan rasa kebersamaan kita melalui sebuah pantun.

**Mentari Pagi Menebar Senyuman
Mentari Pagi Menebar Senyuman
Nyanyian Burung Merdu Merayu
Mari Teguhkan Ikatan Kebangsaan
Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju”**

Peserta Sidang Tepuk Tangan

**Di bawah naungan cahaya rembulan
Bahtera tersandar di pelabuhan
Di tengah suasana keprihatinan
Mari bangun semangat kebersamaan**

Peserta Sidang Tepuk Tangan

Sebelum kami menyampaikan pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2020, ijinkan kami selaku Pimpinan dan Anggota MPR/DPR/DPD menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo, dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin, atas perkenannya hadir secara fisik memenuhi undangan kami dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di tengah kesibukan beliau berdua menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya masing-masing.

Sidang Majelis, hadirin yang kami muliakan, di samping rasa syukur yang mendalam, kita juga wajib menyambut dengan suka cita, sesaat lagi bangsa Indonesia akan memasuki usianya yang ke-75 tahun, usia yang tentu sudah tidak muda lagi bagi sebuah bangsa yang besar. Sepatutnya kita semua memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pendiri bangsa, Bapak proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta, yang telah menghantarkan bangsa Indonesia hingga saat ini menjadi

bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat, sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Melalui mimbar Sidang Paripurna ini, kami Pimpinan dan Anggota MPR/DPR/DPD RI mengucapkan Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk mewujudkan visi abadi bangsa Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Semoga kita juga diberi kekuatan untuk mewujudkan misi abadi bangsa Indonesia, yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sidang Majelis, hadirin yang kami muliakan, sebagaimana kita pahami bersama bahwa Sidang Tahunan MPR yang telah kita selenggarakan sejak MPR masa jabatan 2014 – 2019, telah memberikan warna tersendiri dalam kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan kita. Sidang Tahunan MPR menempati kedudukan yang tinggi sebagai konvensi ketatanegaraan yang melengkapi kaidah konstitusional dalam praktek penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Oleh karena itu, Sidang Tahunan MPR memiliki arti yang sangat penting bagi lembaga lembaga negara, menjadi forum untuk menegakan kedaulatan rakyat, membangun komunikasi, sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui laporan kinerja pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional masing-masing lembaga negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Di sisi yang lain, Sidang Tahunan MPR juga menjadi wahana menumbuhkan demokrasi yang menjamin hak-hak konstitusional warga negara dan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan tugas lembaga-lembaga negara sesuai amanat konstitusi. Juga niscaya menjadi ruang untuk melakukan evaluasi dan refleksi bagi masyarakat atas pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, implementasi prinsip checks and balances, guna mewujudkan mekanisme kontrol dan keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Oleh karena itu, konvensi ketatanegaraan yang secara konstitusional diatur dalam Pasal 151 ayat (2) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib MPR,

bukanlah agenda seremonial belaka, tetapi agenda penting ketatanegaraan yang syarat dengan esensi demokrasi berdasarkan prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.

Sidang Majelis, hadirin yang kami muliakan, MPR adalah lembaga negara, lembaga demokrasi dan lembaga permusyawaratan yang menjalankan mandat rakyat berdasarkan konstitusi negara. Wewenang yang dimilikinya sungguhlah mulia, terkait dengan hukum dasar negara, yakni kewenangan mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi negara yang mengatur berbagai dimensi strategis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain kewenangan mengubah dan menetapkan hukum dasar negara, MPR memiliki kewenangan yang tidak kalah pentingnya dalam menjaga dan melegitimasi keberlangsungan transisi pemerintahan negara, yakni melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Syukur alhamdulillah Sidang Paripurna MPR untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berlangsung dengan aman dan damai.

Suksesnya pelaksanaan Sidang Paripurna MPR Pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut, pastilah berkat dukungan seluruh pihak yang tetap kokoh menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meskipun proses demokrasi berlangsung sangat dinamis. Namun kenyataannya peristiwa puncak pesta demokrasi itu, mendapat apresiasi yang tinggi dari negara-negara sahabat. Beberapa Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Utusan Khusus dari negara-negara sahabat hadir memberi dukungan dan menyaksikan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2019 yang lalu.

Oleh karena kami semua yakin dan optimis apapun tantangan dalam mengawal demokrasi di Indonesia, akan indah pada akhirnya. Seperti indahnya kebersamaan kita pada hari ini, Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dilaksanakan secara bersama sama. Tidak terasa sama sekali ada mendung di hati, semua nampak cerah, guyub-rukun menjalankan tugas-tugas konstitusional, semangat

mengabdikan dengan penuh ketulusan untuk masyarakat, bangsa dan negara. Ini sebuah pertanda, bahwa kita sama, tidak ada lagi perbedaan, semua kembali pada visi abadi kita yakni memajukan Indonesia kita, menuju Indonesia Adil, Makmur, Sejahtera dan Mandiri.

Sidang Majelis, hadirin yang kami muliakan, dalam Sidang Paripurna ini, izinkan kami menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas-tugas MPR sesuai amanat Pasal 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019, yakni tugas untuk melaksanakan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR RI, mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 dan pelaksanaannya, serta menyerap aspirasi masyarakat dan daerah tentang pelaksanaan Undang Undang Dasar.

Tugas Pertama terkait dengan Sosialisasi Empat Pilar MPR. MPR telah membentuk Badan Sosialisasi MPR yang anggotanya berjumlah 45 (empat puluh lima) orang anggota, perwakilan Fraksi-fraksi dan Kelompok DPD. Di samping melaksanakan tugas melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR, MPR melalui Badan Sosialisasi juga telah melakukan langkah-langkah strategis dan konkrit melakukan evaluasi terhadap materi dan metoda sosialisasi Empat Pilar MPR, yang disesuaikan dengan segmentasi masyarakat, khususnya para generasi milenial.

Di masa pandemi covid-19, sosialisasi Empat Pilar MPR juga disesuaikan metodenya sehingga kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja MPR. Di samping pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar MPR, MPR melakukan gerakan aktualisasi nilai-nilai empat pilar MPR untuk menyikapi berbagai kondisi masyarakat, bangsa dan negara, melalui Program MPR Peduli Melawan Covid-19, serta program lainnya yang bertujuan membantu masyarakat dalam menghadapi Pandemi Covid-19 ini.

Selanjutnya, tugas MPR terkait dengan pengkajian terhadap sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 dan pelaksanaannya, MPR telah membentuk Badan Pengkajian MPR, yang anggotanya berjumlah 45 (empat puluh lima) orang perwakilan dari Fraksi-Fraksi dan Kelompok DPD. Badan Pengkajian MPR fokus

menindaklanjuti Rekomendasi MPR masa jabatan 2014 – 2019, serta melakukan kajian terhadap isu aktual dan strategis yang berkembang di masyarakat sebagai hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah di daerah pemilihan.

Isu aktual dan strategis yang tengah dibahas oleh Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan meliputi Ideologi Pancasila, Desa dan Pemerintahan Desa, Pemilihan Umum, Ketahanan Nasional dan Efektivitas Penanggulangan Pandemi Covid-19, serta Omnibus Law Cipta Kerja. Tentu hasil kajiannya nanti menjadi rekomendasi MPR untuk disampaikan kepada lembaga-lembaga negara lainnya, sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Untuk mendukung tugas MPR dan alat kelengkapannya juga telah dibentuk Komisi Kajian Ketatanegaraan yang anggotanya berjumlah 45 (empat puluh lima) orang pakar, ahli, praktisi yang memiliki keahlian dalam bidang konstitusi dan ketatanegaraan.

Terkait dengan tugas MPR melakukan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah, MPR dan alat kelengkapannya telah melaksanakan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat daerah di daerah pemilihan. Penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah juga dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019 terkait perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara dan Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dilakukan kepada lembaga-lembaga negara, berbagai kelompok strategis masyarakat, partai-partai politik, maupun organisasi sosial keagamaan melalui kegiatan safari dan silaturahmi kebangsaan. Insya Allah dengan tata kelola penyerapan aspirasi masyarakat, daerah dan lembaga negara oleh Sekretariat Jenderal MPR yang berbasis pada teknologi informasi (e-aspirasi konstitusi), maka masyarakat, daerah dan lembaga negara akan semakin mudah menyampaikan aspirasi tentang pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 kepada MPR.

MPR juga memiliki alat kelengkapan lainnya, yakni Badan Penganggaran yang bertugas memberikan arah kebijakan perencanaan program, kegiatan dan anggaran MPR. Badan Penganggaran MPR lah yang menyusun strategi perencanaan program dan kebutuhan anggaran untuk mendukung tugas-tugas konstitusional MPR. Syukur Alhamdulillah, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan

kepada MPR tanggal 10 Agustus 2020 yang lalu, MPR meraih kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan negara MPR Tahun 2019.

Sidang Majelis, hadirin yang kami muliakan, selain melaksanakan tugas-tugas sebagaimana diamanatkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pimpinan MPR juga aktif menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat. Pada saat kunjungan kerja Pimpinan MPR ke Arab Saudi dan Maroko beberapa waktu yang lalu, Pimpinan MPR menyampaikan gagasan untuk membentuk Majelis Suro Dunia, untuk menjawab pentingnya peningkatan kerjasama antara negara-negara berpenduduk muslim di dunia dalam memerangi radikalisme dan ekstrimisme, serta menjaga perdamaian dunia. Gagasan ini disambut baik oleh pemerintah Arab Saudi dan Maroko dan berjanji akan terlibat aktif mewujudkan gagasan tersebut, dan akan mengajak negara-negara Arab, Eropa dan negara lainnya di Afrika untuk bergabung.

Dewasa ini, upaya menghadirkan tatanan dunia Islam yang harmonis dan berkeadaban dipandang mendesak bagi keberlangsungan hidup umat. Berbagai persoalan baik yang terjadi di dalam suatu negara maupun persoalan antarnegara, jadi salah satu musababnya. Di samping itu, kesenjangan ekonomi antar umat, kemiskinan, ketertinggalan pembangunan, pengabaian hak asasi manusia terutama terkait hak komunitas umat muslim, hak perempuan, dan hak pekerja, juga krisis nuklir dan lingkungan hidup yang mengancam kemanusiaan perlu disikapi secara komprehensif dan seksama.

Penyelesaian masalah tersebut menuntut adanya partisipasi semua pihak dengan melibatkan kerja sama lintas negara, lintas sektor, dan lintas lembaga pemerintahan maupun lembaga non-pemerintahan. Setiap elemen mesti mengambil peran atas dasar solidaritas keislaman yang menjunjung tinggi persatuan, persaudaraan, perasaan senasib sepenanggungan, serta menjunjung tinggi keadilan, penegakan hukum, dan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, menjadi sebuah keuntungan tersendiri apabila terdapat sejumlah wadah saluran organisasi internasional dalam rangka menyikapi isu atau persoalan yang dihadapi umat Islam, sebagai alternatif perjuangan aspirasi umat.

Sidang Majelis, hadirin yang kami muliakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pandemi Covid-19, secara alamiah telah membentuk tatanan dunia baru, kondisi normal baru dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Oleh karena kita sebagai bangsa dituntut mampu menyesuaikan dengan tatanan baru itu, agar kita tetap eksis dan dapat beradaptasi dengan kondisi normal baru tersebut, tanpa kehilangan jatidiri bangsa kita.

Oleh karena itulah, MPR sebagai pengawal ideologi Pancasila, harus menjadikan Pancasila sebagai landasan etika dan moral bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai macam tantangan bangsa baik internal maupun eksternal. Sejalan dengan itu, maka Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa harus terus disosialisasikan, agar dapat menjadi landasan moral dan etik dalam membangun etika politik, etika sosial dan bu daya, etika ekonomi dan bisnis, etika pemerintahan, etika lingkungan dan etika keilmuan.

Dalam kerangka ini, maka dalam waktu dekat MPR akan menyelenggarakan Konvensi Tentang Etika Kehidupan Berbangsa bersama sama dengan Komisi Yudisial dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), untuk menggairahkan kembali pentingnya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa bagi pembangunan jatidiri bangsa Indonesia.

Pandemi covid-19 berikut implikasinya juga tidak hanya berdampak secara langsung terhadap kesehatan masyarakat maupu pendidikan, tetapi juga dimensi yang lain khususnya di bidang ekonomi. Seperti kita ketahui bahwa pada periode Maret sampai pertengahan bulan Agustus 2020 ini menjadi fase terberat bagi perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2020 minus 5,32 persen dibanding triwulan II-2019.

Memburuknya perekonomian tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga pertumbuhan ekonomi global yang merosot tajam karena terganggunya aktivitas perekonomian akibat pandemi Covid-19. Bank Dunia melansir bahwa resesi sudah hampir pasti terjadi di seluruh wilayah ekonomi dunia. Resesi akibat Covid-19 ini merupakan yang terburuk dalam sejarah sejak Perang Dunia II. Sebelumnya Dana Moneter Internasional (IMF) juga telah melansir proyeksi serupa. Bahkan, dalam

outlook yang dipublikasikan pada bulan April 2020, IMF menyebut resesi kali ini lebih dalam daripada era Great Depression pada tahun 1930-an.

Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) pun melansir proyeksi yang sama. Dalam laporan terbarunya, OECD menyebut, pandemi Covid-19 semakin membuat dunia terseret dalam jurang resesi terburuk di luar periode perang dalam 100 tahun. Dampak ekonomi akibat virus corona sangat buruk sekali. Pemulihannya akan lambat dan krisis akan memiliki dampak yang bertahan lama, secara tidak proporsional mempengaruhi golongan masyarakat yang paling rentan.

Jika tidak segera diatasi, efek domino resesi akan menyebar ke berbagai sektor, mulai dari macetnya kredit perbankan hingga lonjakan inflasi yang sulit dikendalikan atau sebaliknya deflasi yang tajam karena perekonomian tidak bergerak. Kemudian, neraca perdagangan akan menjadi minus dan berimbas langsung pada cadangan devisa. Dalam skala riilnya, dampak resesi terhadap sebuah negara adalah meningkatnya pengangguran, anjloknya pendapatan, meningkatnya angka kemiskinan, merosotnya harga aset seperti pasar saham atau properti, melebarnya angka ketimpangan, tingginya utang pemerintah bersamaan dengan penerimaan pajak yang anjlok, serta produksi yang hilang secara permanen, dan bisnis gulung tikar.

Oleh karena itu, saatnya kita bergotong royong terus mendukung kebijakan pemerintah yang telah melakukan langkah konkrit mendorong peningkatan ekonomi sektor riil seperti memberikan kemudahan permodalan bagi pelaku usaha baik kecil maupun besar; mendorong pemerintah dapat menahan laju penurunan ekonomi dengan meningkatkan penyaluran bantuan sosial dan stimulus bagi dunia usaha; mendorong pemerintah melakukan pemulihan ekonomi dan mencegah terjadinya resesi, khususnya restrukturisasi kredit padat karya, penjaminan modal kerja, dan belanja pemerintahan daerah, akan tetapi tetap diiringi dengan pertimbangan dari aspek kesehatan masyarakat; mendorong pemerintah mempersiapkan sejumlah langkah dan strategi untuk mencegah terjadinya efek domino akibat Covid-19; dan mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar dalam menghadapi Pandemi Covid-19 dan tetap optimis bahwa keadaan akan membaik.

Pimpinan dan Anggota MPR memberikan dukungan kepada Pemerintah untuk mensinergikan kebijakan pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. Keputusan Pemerintah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kami pandang sangat tepat, mengingat persoalan ekonomi dan kesehatan tidak dapat dipisahkan dengan penanganan Covid-19.

Pengalaman sejumlah negara menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Tidak sedikit negara yang lebih mengutamakan penanganan kesehatan pada akhirnya menghadapi persoalan ekonomi yang kompleks, bahkan sampai terjadi resesi. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan penyelesaian persoalan kesehatan dan sekaligus perekonomian. Tentu dengan catatan, bahwa kesehatan tetap menjadi prioritas karena dengan sehat, persoalan ekonomi menjadi lebih mudah penanganannya.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah peringatan dari Food and Agricultural Organization (FAO), mengenai ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Pertarungan dalam memenuhi dan mengawal ketersediaan pangan akan menjadi penentu gerak bandul geopolitik global. Kondisi ini memaksa setiap negara merancang politik pangan, pertama-tama, untuk kepentingan domestiknya.

Dalam kaitan ini, Pimpinan MPR perlu mengingatkan bahwa produksi dalam negeri akan menjadi tumpuan utama bagi kita saat ini. Fasilitas produksi, seperti mesin dan peralatan pertanian, subsidi pupuk dan benih, serta fasilitas pendukung produksi lainnya, perlu menjadi prioritas bagi peningkatan produksi dalam negeri.

Mengingat 93% mayoritas petani Indonesia adalah petani kecil, maka fasilitas dan bantuan sangat dibutuhkan agar mereka terbantu untuk meningkatkan kinerja produksinya. Dalam situasi pandemi saat ini, selain fasilitas atau bantuan, diperlukan juga protokol produksi yang dapat menjamin kualitas dan keamanan pangan yang terbebas dari Covid-19.

Sidang Majelis, hadirin yang kami muliakan, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan perkembangan pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional MPR dalam satu tahun masa tugasnya sebagai pelaksanaan dari prinsip akuntabilitas publik lembaga MPR kepada masyarakat. Alhamdulillah, MPR mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat. Hasil survei yang dilakukan oleh

Lembaga Survei Indikator Politik dan survei yang dilakukan oleh Charta Politika Indonesia. Menyebutkan MPR masuk dalam 5 (lima) besar sebagai Lembaga Terpercaya setelah Tentara Nasional Indonesia, Presiden, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan KPK. Kepercayaan masyarakat tersebut akan menjadi dorongan bagi Pimpinan dan Anggota MPR untuk bekerja secara lebih sungguh-sungguh dalam mengemban amanat rakyat.

Akhirnya Kami Pimpinan dan Anggota Majelis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada lembaga-lembaga negara yang telah menyampaikan dokumen laporan kinerja tentang pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 kepada publik, yang sangat berguna bagi MPR dalam mendukung tugas konstitusional MPR sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang MD3. Selanjutnya laporan kinerja tersebut akan kami sampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas konstitusional lembaga negara.

Selanjutnya sebelum kita mendengarkan Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara yang akan disampaikan oleh Presiden sekaligus Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia, pada sidang akan kami serahkan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD. Ketua DPR RI, Saudari Puan Maharani akan melanjutkan persidangan sampai ditutupnya Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama MPR dan DPD.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, ijin kami mengakhiri pengantar Sidang Tahunan MPR ini dengan pantun. Karena Pandemi Covid-19 masih terus mengancam kita, maka

**“Biarkan cinta tumbuh bersemi,
Seindah mutiara untaian kata.
Bersama kita hadapi pandemi,
Satukan langkah menggapai cita.
Bertebar gugus bintang di awan,
Mengantar malam dalam buaian.
Masa pandemi adalah ujian,
Mari bersatu rapatkan barisan.
Cuci tangan sampai bersih,
Cukup sekian dan terima kasih”.**

*Wabillahi Taufiq Walhidayah. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.*

Selanjutnya, Pimpinan Sidang saya serahkan kepada Ketua DPR RI.

5. Pimpinan Sidang : DR. (HC) Puan Maharani (Ketua DPR RI)

Terima kasih kami sampaikan kepada ketua MPR RI, palu sidang telah kami terima dan sidang kami lanjutkan.

Ketuk Palu 1X

Seperti kita ketahui bersama bahwa pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terjadi perubahan sistem ketatanegaraan kedudukan maupun kewenangan lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu penting kiranya menjaga kerjasama antar lembaga negara karena kewenangan yang dimiliki oleh setiap lembaga negara. Ada yang dapat dilaksanakan secara mandiri dan ada juga yang harus dikerjakan bersama dengan lembaga lain. Lembaga negara yang ada saat ini juga mencerminkan adanya keseimbangan kekuasaan.

Selanjutnya saya akan menyampaikan pengantar sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada kesempatan ini.

Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Kyai Haji Ma'ruf Amin.

Yang terhormat, Presiden Republik Indonesia kelima Ibu Megawati Soekarnoputri. Yang terhormat, Presiden Republik Indonesia keenam Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia keenam Bapak Tri Sutrisno. Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia kesembilan Bapak Hamzah Haz. Yang terhormat, Wakil Presiden Indonesia kesepuluh dan keduabelas Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia kesebelas Bapak Budiono.

Yang terhormat Ketua dan Para Wakil Ketua MPR RI. Yang terhormat Wakil Ketua dan anggota DPR RI. Yang terhormat Ketua, Para Wakil Ketua dan anggota DPD RI;

Yang terhormat, Ketua dan Para Wakil Ketua lembaga negara. Yang terhormat, Para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang Mulia Para Duta Besar Kepala Perwakilan Negara Sahabat. Yang terhormat, Para Ketua Umum Partai Politik.

Yang terhormat, para undangan dan hadirin yang hadir secara fisik maupun virtual serta yang kami muliakan seluruh Rakyat Indonesia.

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya atas segala rahmat, karunia dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat menghadiri sidang bersama DPR RI dan DPD RI sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas konstitusional. Sidang bersama tahun ini sedikit berbeda dengan sidang-sidang tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena situasi saat ini masih diliputi pandemik Covid-19. Pelaksanaan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD pada tahun ini juga diselenggarakan dalam satu rangkaian kegiatan.

Saudara Presiden dan saudara Wakil Presiden, hadirin sidang yang terhormat dan seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Saat ini kita bersama sedang menghadapi penanganan pandemik covid-19 yang telah berdampak luas terhadap seluruh sendi kehidupan rakyat dan penyelenggaraan negara. Pandemi tersebut memberikan ancaman yang sangat serius terhadap keselamatan rakyat, perekonomian

negara dan rumah tangga serta kesejahteraan rakyat. Sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 terdapat 132.816 kasus covid-19 yang tersebar 34 provinsi dan 480 kabupaten kota dengan jumlah yang dinyatakan sembuh sebanyak 87.558 orang dan jumlah yang meninggal dunia mencapai 5.968 jiwa.

Pada sektor perekonomian nasional sumber-sumber pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi. Pada kuartal kedua tahun ini pertumbuhan ekonomi berkontraksi hingga -5,32% year on year. Semua sektor dan lapangan usaha rakyat terganggu sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan, meningkatnya pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan dan menurunnya derajat kesejahteraan rakyat secara luas. Menghadapi kondisi bencana non alam yang luar biasa ini, diperlukan kehadiran negara untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman krisis kesehatan, ancaman krisis ekonomi dan ancaman krisis kesejahteraan dengan melakukan upaya-upaya yang luar biasa melalui serangkaian kebijakan dan program penanggulangan covid-19 dan dampaknya.

Untuk meningkatkan kapabilitas di bidang kesehatan, memperluas perlindungan sosial, melaksanakan pembatasan sosial berskala besar serta mempercepat pemulihan ekonomi. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan atau dalam rangka menghadapi yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Pemerintah telah diberikan ruang kemenangan yang memadai dalam menjalankan kebijakan fiskal, kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan untuk mengatasi pandemi covid-19 dan dampaknya.

Asas keselamatan rakyat merupakan asas tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini semakin penting ketika kita dihadapkan dengan pandemi covid-19. Oleh karena itu, berbagai upaya dan kebijakan negara untuk menyelamatkan rakyat haruslah mendapatkan dukungan dari semua pihak. Namun di sisi lain rakyat juga menuntut kinerja pemerintah yang optimal dalam bertindak sigap, cepat dan terpadu dalam menjalankan berbagai program untuk melindungi rakyat, membantu rakyat dan memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia. Tatanan,

kebiasaan dan perilaku baru untuk beradaptasi dengan covid-19 serta pulihnya perekonomian nasional menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan berbagai langkah yang efektif baik melalui kebijakan, koordinasi lintas sektor, melalui instrumen fiskal maupun moneter, serta mengkonsolidasikan seluruh potensi dan sumber daya yang ada untuk dapat segera memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia. Kita patut memberikan apresiasi atas kerja bersama, gotong royong, seluruh komponen bangsa baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dokter, tenaga kesehatan, satgas covid-19, TNI, Polri, BUMN, Swasta, relawan serta segenap unsur masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19. Semangat gotong royong inilah yang membuat kita telah mampu dan bertahan menghadapi covid-19 hingga saat ini.

Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Hadirin Sidang Dewan yang terhormat dan seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Tiga hari ke depan tanggal 17 Agustus 2020, bangsa Indonesia akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Peringatan hari kemerdekaan dimaksudkan selain untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga agar kita merdeka dan bebas dari belenggu penjajahan, juga menjadi momentum untuk merefleksikan kembali perjalanan panjang bangsa Indonesia yang penuh dengan dialektika dalam menghadirkan dinamika dan membentuk gelombang romantika yang bermuara pada peradaban bangsa dan negara Indonesia menjadi seperti saat ini.

Proklamator Indonesia, Bung Karno, sesaat setelah menyampaikan pidato teks proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, beliau mengatakan kita sekarang telah merdeka, tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, Negara Republik Indonesia, merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Indonesia merdeka, sejatinya adalah penentuan nasib bangsa dan Tanah Air di dalam tangan kita sendiri untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu adil dan makmur.

Telah panjang perjalanan Indonesia dalam membangun kekuatannya untuk menentukan nasib bangsa dan tanah airnya sendiri, selama 75 tahun membangun kekuatannya tersebut bangsa Indonesia telah mengalami perkembangan baik dari

sistem tata negara, sistem demokrasi, sistem pemerintahan, pola pembangunan, administrasi pemerintahan, serta hubungan antar lembaga negara.

Membangun Indonesia memiliki arti yang sangat luas, yaitu membangun dalam segala bidang kehidupan negara dan masyarakat untuk menuju ke arah dan cita-cita kemerdekaan seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia secara tegas telah diguratkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam mewujudkan tujuan bernegara tersebut diperlukan politik pembangunan untuk dapat mengelola, mengatur dan mengendalikan sumberdaya bangsa dan negara yang diarahkan untuk membangun kekuatan nasional. Arah politik pembangunan adalah hal inti di dalam suatu pembangunan, pembangunan tanpa arah politik yang jelas ibarat kapal tanpa kompas. Pembangunan tanpa dipimpin oleh visi misi politik pembangunan yang jelas ibarat kapal tanpa nahkoda yang akan hancur karena membentur karang atau tenggelam karena diterjang badai.

Indonesia maju menjadi tema dalam peringatan hari kemerdekaan republik Indonesia yang ke-75 merupakan sebuah tekad kita semua untuk dapat mengarahkan politik pembangunan nasional kita untuk dapat mewujudkan Indonesia maju di segala bidang. Pandemi covid 19 telah memberikan ujian kepada capaian kemajuan Indonesia saat ini di berbagai bidang. Kita dapat melihat berbagai kekurangan masih perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya untuk mewujudkan Indonesia maju. Kita masih perlu meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah. Kita masih perlu memperkuat sistem penanggulangan bencana yang terpadu dan yang terkoordinasi. Kita masih perlu menyempurnakan sistem jaminan sosial dan perlindungan sosial. Kita masih perlu memperkuat regulasi untuk mencegah krisis ekonomi. Kita juga membutuhkan regulasi yang dapat menselaraskan otoritas kebijakan fiskal dan otoritas kebijakan moneter dalam menghadapi krisis ekonomi.

Saat ini kita juga berada dalam era kemajuan zaman yang sangat dinamis dan terbuka secara sosial, budaya, ekonomi dan politik serta persaingan global yang semakin tajam. Sebagai bangsa dan negara kita semakin dituntut untuk memiliki kemampuan dan kekuatan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya agar dapat menentukan nasib bangsa dan Tanah Air oleh kedaulatannya sendiri.

Selama 75 tahun Indonesia merdeka, telah banyak capaian kemajuan yang diraih, kemajuan tersebut berada dalam gerak pergerakan zaman yang selalu berkembang dan menghadirkan tantangan baru. Oleh karena itu, untuk memperoleh Indonesia maju, kita juga harus dapat bergerak cepat seiring dengan cepatnya perkembangan peradaban dunia di berbagai bidang. Untuk mempercepat terwujudnya Indonesia maju yang memiliki kekuatan politik, sosial, budaya dan ekonomi. Maka politik pembangunan kita ke depan hendaknya dapat diarahkan untuk mempercepat pembangunan manusia Indonesia, memperkuat industri pangan nasional, penataan industri nasional yang kuat, pemerataan pembangunan infrastruktur serta optimalisasi reformasi birokrasi.

Indonesia juga adalah negara hukum. Oleh karena itu, semangat Indonesia maju juga perlu jadi tujuan bersama dalam pembangunan hukum untuk memenuhi kebutuhan nasional. Produk hukum yang dihasilkan harus mampu mendukung tujuan bernegara dan membawa Indonesia maju. Kebutuhan hukum akan selalu mengikuti perkembangan zaman dan produk hukum yang dihasilkan tetap harus selalu berlandaskan pada Pancasila sebagai landasan filosofi, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus bersama dan rasa keadilan dalam masyarakat sebagai landasan sosiologis. Sudah saatnya produk-produk hukum warisan zaman kolonial dapat digantikan oleh produk hukum Indonesia yang merdeka, yang tentu saja telah mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya, sosial, dan sosiologis Bangsa Indonesia.

Indonesia maju juga merupakan taman sari dari kemajuan pembangunan daerah, dalam rangka melanjutkan kemajuan daerah maka pada bulan Desember yang akan datang kita kembali akan melaksanakan pesta demokrasi dengan menggelar

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak di beberapa wilayah. Pesta demokrasi ini merupakan suatu proses politik Bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Kita mengharapkan agar seluruh masyarakat yang akan menjalankan Pilkada serentak untuk aktif berpartisipasi demi terpilihnya kepala daerah terbaik yang mampu membangun kemajuan di daerahnya. Kita juga berharap agar partai politik yang merupakan pilar demokrasi sangat penting bagi sistem politik di negara kita juga turut berperan aktif dalam memberi teladan bagaimana berpolitik secara demokratis berdasarkan Pancasila. Dalam mewujudkan Indonesia maju politik pembangunan juga harus dapat membuka ruang dan akses partisipasi seluruh rakyat Indonesia karena setiap rakyat juga memikul tanggung jawab yang sama dalam berkontribusi pada kepentingan nasional.

Bung Karno berkata “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri” pesan ini menyiratkan betapa pentingnya persatuan bangsa dalam membangun Indonesia, diperlukan kebersamaan seluruh anak bangsa dalam membangun Indonesia, diperlukan gotong royong dari semua anak bangsa. Kebersamaan yang bersumber dari cinta pada Tanah Air dan cinta pada Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ber-Pancasila dan ber-Bhinneka Tunggal Kita. Kerja bersama, gotong royong kita semua, MPR RI, DPR RI, DPD RI dan pemerintah masing-masing mengambil satu usaha, satu amal, dan satu pekerjaan untuk kepentingan bersama yaitu Indonesia. Semua untuk Indonesia, Indonesia untuk semua.

Peserta Sidang Tepuk Tangan

Dengan mewarisi semangat dan jiwa proklamasi 17 Agustus 1945 mari kita bersatu untuk membangun kekuatan bangsa dan negara agar kita dapat menentukan nasib bangsa dan nasib Tanah Air di dalam tangan kita sendiri. Kita kuat karena bersatu, bersatu karena kuat. Inilah semangat kita bersama bersatu untuk Indonesia.

Saudara Presiden dan saudara Wakil Presiden, hadirin sidang dewan yang terhormat dan seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Kini tibalah saatnya kami

mempersilahkan saudara presiden untuk menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahu ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia dihadapan sidang bersama DPR RI dan DPD RI di hari ini. Kepada saudara Presiden kami persilahkan.

Peserta Sidang Tepuk Tangan

6. Persiden Republik Indonesia: Ir. H. Joko Widodo

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat Pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. *Om Swastyastu. Namo Buddhaya.* Salam Kebajikan.

Yang saya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak KH. Ma'ruf Amin beserta Ibu Wury Estu Ma'ruf Amin.

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota MPR Republik Indonesia. Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota DPR Republik Indonesia. Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota DPD Republik Indonesia. Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua.

Dan, para Anggota Lembaga-Lembaga Negara.

Yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima. Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia Keenam. Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno dan Bapak Hamzah Haz. Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, Yang saya hormati Bapak Muhammad Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla. Yang saya hormati Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono. Yang saya hormati Ibu Hajah Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid.

Yang saya hormati, Yang Mulia Para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional.

Yang saya hormati, para Ketua Umum Partai Politik yang hadir,

Yang saya hormati para hadirin, Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Semestinya, seluruh kursi di Ruang Sidang ini terisi penuh, tanpa ada satu kursi pun yang kosong. Semestinya, sejak 2 minggu yang lalu, berbagai lomba dan kerumunan penuh kegembiraan, karnaval-karnaval perayaan peringatan hari kemerdekaan diadakan, menyelimuti suasana bulan kemerdekaan ke-75 RI.

Namun, semua yang sudah kita rencanakan tersebut harus berubah total. Semua ini tidak boleh mengurangi rasa syukur kita dalam memperingati 75 Tahun Indonesia Merdeka.

Peserta Sidang Tepuk Tangan

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, sebanyak 215 negara, tanpa terkecuali, sedang menghadapi masa sulit diterpa pandemi Covid-19. Dalam catatan WHO, sampai dengan tanggal 13 Agustus kemarin, terdapat lebih dari 20 juta kasus di dunia, dengan jumlah kematian di dunia sebanyak 737 ribu jiwa.

Semua negara, negara miskin, negara berkembang, termasuk negara maju, semuanya sedang mengalami kemunduran karena terpapar Covid-19.

Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah. Di kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus 2,97%, tapi di kuartal kedua kita minus 5,32%.

Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen, sampai minus 17%. Kemunduran banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan.

Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan re-start, harus melakukan *re-booting*. Semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya.

Saya menyambut hangat seruan moral penuh kearifan dari para ulama, para pemuka agama, dan tokoh-tokoh budaya agar menjadikan momentum musibah

pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar.

Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar. Strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan.

Peserta Sidang Tepuk Tangan

Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara *Upper Middle Income Country*. 25 tahun lagi, pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia Negara Maju.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Kita harus melakukan reformasi fundamental dalam cara kita bekerja. Kesiap-siagaan dan kecepatan kita diuji. Kita harus mengevakuasi Warga Negara Indonesia dari wilayah pandemi di Tiongkok. Kita harus menyiapkan rumah sakit, rumah isolasi, obat- obatan, alat kesehatan, dan mendisiplinkan protokol kesehatan. Semuanya harus dilakukan secara cepat, dalam waktu yang sangat singkat.

Ketika krisis kesehatan tersebut berdampak pada perekonomian nasional, kita juga harus cepat bergerak: memberikan bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT Desa, dan subsidi gaji; membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh banpres produktif berupa bantuan modal darurat, dan membantu pembelian produk-produk mereka; membantu tenaga kerja yang menjadi korban PHK, antara lain melalui bantuan sosial dan Program Prakerja. Sesuatu yang tidak mudah.

Untuk itu semua, pemerintah cepat melakukan perubahan rumusan program; menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini; melakukan realokasi anggaran dalam waktu singkat; menerbitkan Perppu No.1 Tahun 2020, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU No.2 Tahun 2020.

Terima kasih Anggota DPR atas kerja cepatnya.

Peserta Sidang Tepuk Tangan

Mensinergi dengan BI, OJK, dan LPS untuk memulihkan perekonomian.

Krisis ini telah memaksa kita untuk menggeser channel cara kerja. Dari cara-cara normal menjadi cara-cara ekstra-normal. Dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa. Dari prosedur panjang dan berbelit menjadi *smart short cut*. Dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil.

Pola pikir dan etos kerja kita harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan sangat dibutuhkan. Efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan. Kedisiplinan nasional dan produktivitas nasional harus ditingkatkan.

Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Perjuangan untuk menghambat penyebaran Covid-19, mengobati yang sakit, dan mencegah kematian sudah luar biasa kita lakukan. Atas nama rakyat, bangsa dan negar, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dokter dan perawat, serta seluruh petugas di rumah sakit, di laboratorium, di klinik – klinik kesehatan, dan di rumah isolasi.

Peserta Sidang Tepuk Tangan

Kepada tokoh masyarakat, para relawan, awak media, aparat TNI dan Polri, serta para ASN di pusat dan di daerah.

Dengan peristiwa pandemi ini, maka reformasi fundamental di sektor kesehatan harus kita percepat. Orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat harus diutamakan. Penguatan kapasitas SDM, pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan, serta industri obat dan alat kesehatan harus diprioritaskan. Ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan secara besar-besaran.

Demikian pula halnya dengan ketahanan pangan, dengan menjamin kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu produksi sampai hilir distribusi, ke seluruh wilayah negeri. Efisiensi produk pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi, dan metode korporasi petani akan terus ditingkatkan.

Food estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri. Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi menggunakan teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital. Bukan hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk pasar internasional.

Saat ini sedang dikembangkan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara.

Peserta Sidang Tepuk Tangan

Dan akan dilakukan di beberapa daerah lain. Program ini merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku wisata, dan masyarakat sebagai pemilih lahan maupun sebagai tenaga kerja.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, upaya besar juga telah dan sedang dilakukan untuk membangun kemandirian energi. Tahun 2019, kita sudah berhasil memproduksi dan menggunakan B20. Ahun ini kita mulai dengan B30, sehingga kita mampu menekan nilai impor minyak kita di tahun 2019.

Pertamina bekerja sama dengan para peneliti telah berhasil menciptakan katalis untuk pembuatan D100, yaitu bahan bakar diesel yang 100% dibuat dari minyak kelapa sawit, yang sedang uji produksi di dua kilang kita. Ini akan menyerap minimal 1 juta ton sawit produksi petani untuk kapasitas produksi 20 ribu barel per hari.

Hilirisasi bahan mentah yang lain juga terus dilakukan secara besar-besaran. Batu bara diolah menjadi methanol dan gas. Beberapa kilang dibangun untuk mengolah minyak mentah menjadi minyak jadi, dan sekaligus menjadi penggerak industri petrokimia yang memasok produk industri hilir bernilai tambah tinggi.

Biji nikel telah bisa diolah menjadi ferro nikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Hal ini akan memperbaiki defisit transaksi berjalan kita, meningkatkan peluang kerja, dan mulai mengurangi dominasi energi fosil. Hal ini akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik dunia, dan produsen teknologi di masa depan.

Prinsip yang sama juga akan digunakan dalam membangun kawasan-kawasan industri lainnya, termasuk pembangunan super koridor ekonomi pantai utara Jawa. Kawasan Industri Batang serta Subang-Majalengka sedang dikembangkan dalam waktu singkat, dirancang untuk mampu mengundang investasi berkualitas, yang bersinergi dengan UMKM kita, yang memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian nasional, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Kawasan industri serupa juga akan dibangun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang selalu bersinergi dengan kewirausahaan masyarakat dan UMKM, untuk menyediakan kesempatan kerja bagi generasi muda yang belum bekerja, dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri.

Oleh karena itu, ekosistem nasional yang kondusif bagi perluasan kesempatan kerja yang berkualitas harus kita bangun. Penataan regulasi harus kita lakukan. Regulasi yang tumpang tindih, yang merumitkan, yang menjebak semua pihak dalam risiko harus kita sudahi.

Semua ini kita dedikasikan untuk perekonomian nasional yang adil, untuk kepentingan yang sudah bekerja, untuk kepentingan yang sedang mencari kerja, untuk mengentaskan kemiskinan, dengan menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas seluas-luasnya.

Kita ingin semua harus bekerja. Kita ingin semua sejahtera.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif.

Fleksibilitas yang tinggi dan biroksi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi. Semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM. Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan.

Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

Penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia. Agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan.

Nilai-nilai luhur Pancasila, negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional, tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapa pun yang menggoyahkannya.

Sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan, yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi.

Saya ingin semua *platform* teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Peran media-digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

Semestinya, perilaku media tidak dikendalikan untuk mendulang *click* dan menumpuk jumlah *like*, tapi seharusnya didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa.

Peserta Sidang Tepuk Tangan

Ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Bahkan, kemajuan ekonomi jelas membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat. Kita harus bangga terhadap produk Indonesia. Kita harus membeli produk dalam negeri.

Peserta Sidang Tepuk Tangan

Kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, hadirin sekalian yang berbahagia, tujuan besar tersebut hanya bisa dicapai melalui kerja sama seluruh komponen bangsa dengan gotong royong, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan yang mulia.

Demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri, dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasila sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar.

Peserta Sidang Tepuk Tangan

Kita beruntung bahwa mayoritas rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh toleransi dan saling peduli, sehingga masa-masa sulit sekarang ini bisa kita tangani secara baik.

Kita beruntung dan berterima kasih atas dukungan dan kerja cepat dari Pimpinan dan Anggota lembaga-lembaga negara yang melakukan langkah-langkah *extraordinary* dalam mendukung penanganan krisis dan membajak momentum krisis untuk menjalankan strategi-strategi besar bangsa.

MPR dengan cepat membuat payung program baru “MPR Peduli Covid-19” serta terus melakukan sosialisasi dan aktualisasi Pancasila serta pengkajian sistem ketatanegaraan dan konstitusi kita.

Dengan sangat cepat, sangat responsif, DPR langsung membahas, dan kemudian menyetujui dan mengesahkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-

Undang untuk memberikan payung hukum dalam mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian;

Peserta Sidang Tepuk Tangan

Perpu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk melandasi penundaan pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah.

Agenda-agenda legislasi yang lain juga tetap berjalan efektif, antara lain Pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta RUU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Respon cepat juga dilakukan oleh DPD terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi oleh daerah, mulai dari pemberdayaan ekonomi rakyat melalui BUMDes, peningkatan daya saing daerah, dan dukungan penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan 9 RUU usul inisiatif DPD dan beberapa agenda lain sesuai bidang tugas DPD.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, di tengah berbagai kesulitan teknis selama pandemi, BPK secara cepat dan cermat telah memeriksa dan menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan 2019, memberikan 36.000 rekomendasi kepada pemerintah, dan memerintahkan penyetoran ke kas negara senilai Rp 1,39 triliun rupiah.

Tugas internal yang berat tersebut tidak mengganggu agenda BPK untuk melanjutkan perannya sebagai pemeriksa eksternal pada badan-badan internasional, serta keanggotaannya pada *Independent Audit Advisory Committee* di bawah PBB.

Demikian pula halnya dengan Mahkamah Agung yang menjamin kecepatan pelayanan persidangan di era pandemi. Penyediaan layanan persidangan virtual dengan menggunakan aplikasi e-court dan e-litigasi telah mempercepat persidangan di luar persidangan terbuka dan tatap muka.

Guna terus memperluas akses bagi para pencari keadilan, MA terus menambah layanan pos bantuan hukum dan memodernisasi manajemen perkara

melalui layanan pengadilan elektronik. Hal ini membuat MA berhasil memangkas tunggakan sisa perkara secara signifikan.

Keberhasilan MA tersebut juga berkat dukungan dari Komisi Yudisial sesuai dengan kewenangannya. Pengusulan calon Hakim Agung, calon hakim ad hoc Tipikor, dan calon hakim ad hoc Hubungan Industrial tetap berjalan lancar. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim, pemantauan persidangan, investigasi, dan advokasi hakim.

Sepanjang tahun 2019 hingga Juni 2020, KY telah menangani 1.584 laporan masyarakat dan merekomendasikan 225 penjatuhan sanksi. Kecepatan dan kecermatan Mahkamah Konstitusi juga sangat patut untuk kita apresiasi. MK juga terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pemanfaatan layanan elektronik guna melayani masyarakat dalam mencari keadilan.

MK telah berhasil mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang dari waktu penyelesaian 101 hari kerja per perkara di 2017 menjadi rata-rata 59 hari kerja per perkara. Sepanjang tahun 2019 hingga awal tahun 2020, MK telah menyelesaikan 122 perkara pengujian undang-undang.

Pada saat yang sama, perluasan kerja sama di dalam maupun di luar negeri pun terus ditingkatkan. MK aktif menginisiasi dan mengkoordinasi berbagai kegiatan di tingkat regional maupun global agar sistem hukum kita dijadikan rujukan bagi negara-negara demokrasi di berbagai penjuru dunia.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, masih banyak langkah-langkah besar yang harus kita lakukan. Masih tersedia waktu 25 tahun lagi bagi kita untuk menyiapkan seabad Indonesia merdeka, untuk membangun Indonesia yang kita cita-citakan.

Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar, memanfaatkan momentum krisis yang saat ini sedang terjadi.

Krisis memberikan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan lompatan transformasi besar, dengan melaksanakan strategi besar.

Mari kita pecahkan masalah fundamental yang kita hadapi. Kita lakukan lompatan besar untuk kemajuan yang signifikan.

Kita harus bajak momentum krisis ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini. Menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju. Menjadikan Indonesia Maju yang kita cita-citakan.

Peserta Sidang Tepuk Tangan

Dirgahayu Republik Indonesia!

Dirgahayu Negeri Pancasila!

Merdeka!

Peserta Sidang: Merdeka!

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namu Buddhaya. Salam kebajikan.

Peserta Sidang Tepuk Tangan

7. Pimpinan Sidang : DR. (HC) Puan Maharani (Ketua DPR RI)

Terima kasih kepada Bapak Persiden yang telah mempergunakan dan memperkenalkan berbagai macam baju adat di setiap acara-acara kenegaraan. Selanjutnya kami persilahkan Saudara Prof. Dr. Nasaruddin Umar Imam Besar Masjid Istiqlal untuk membacakan doa.

8. Doa : Prof. Dr. Nasaruddin Umar., M. A (Imam Besar Mesjid Istiqlal)

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh Om Swastiastu Shalom
Namo Buddhaya Salam Kebajikan.*

*Bismillahirohmanirohim Bismillahirobillah Wa Mina Allah Wa Ila Allah Wa
Ala Allah Wa Fillah Wala Haula Wala Quwwata Illabillah. Allahumma Bariklana Fii
Hadzal Majelis Biridhoik Wa Bariklana Ala Mayafalu Wa Bi Asasidnik Warfa'
Darozatana Bi Darazatil Ulya Janibik. Allahumma Hawil Maqasidana Waqdil Hajatana
Wa Yasir Umurona Fi Waqmil Nidhomana Binidhomil Umuri Shu'udi Hukumah Bi
Rahmatika Ya Arhamarrohimin. Allahumar Fana Bala Wal Waba Wal Zuhzam Wal
Fahsya Wal Sadaid Wal Fitana Wal Mihan Wa Su'il Akhlaq Ma Dhora Minha Wama
Bathon An Biladina Indonesia Wa Sairil Burdan Ya Robbal 'Alamin Allahumma Ja'alna
Wa Min Kuli Fahroja Wa Min Kuli Dikin Mahraja Wa Min Kuli Balain 'Afiah Wa Nasaluka
Assusu'ada Wa Manasil Suhada Wa Shobrun Alal Bala Wa Nasrul Alal Ada.*

Ya Allah ya Rahman ya Rahim dalam keadaan seperti apapun hambaMu wajib mensyukur nikmat kemerdekaan yang sedemikian mahal. Telah engkau anugerahkan kepada kami secara khusus hari ini kami bersyukur karena meskipun berada di tengah ancaman musibah pandemi covid-19. Engkau masih memberikan semangat dan kekuatan kepada kami untuk menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2020, sebuah agenda kenegaraan yang dilakukan bangsa kami guna memaknai proklamasi kemerdekaan yang *Insyallah* 3 hari lagi kami akan merayakannya yang ke-75.

Ya Allah Ya Hannan Ya Mannan berikanlah kekuatan dan daya tahan terhadap bangsa kami untuk bisa beradaptasi dengan berbagai cobaan dan tantangan, anugerahkan lah kemampuan kecerdasan dan kewibawaan dan keikhlasan kepada segenap Pemimpin kami baik Pemimpin forman maupun Pemimpin informal untuk bisa memimpin bangsa dan masyarakat dengan baik dan berkah, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah dan perpecahan diantara kami perkuatlah ikatan kekeluargaan kami sebagai sesama anak bangsa agar bisa mewariskan bangsa yang tangguh kepada generasi pelanjut kami di bawah Panji NKRI.

Ya Allah ya Jabbar ya Qudus berikanlah kekuatan dan semangat kepada kami untuk bisa melewati semua tantangan dan cobaan kami yakin seberat apapun sebuah

cobaan dan tantangan jika engkau hadir bersama kami maka *Inshaallah* semuanya akan menjadi ringan bagi kami dari lubuk hati kami yang amat dalam ya Allah ya Tuhan kami perkenankanlah Kami memohon agar kiranya engkau tidak pernah meninggalkan kami bantulah kami untuk segera mungkin melewati musibah pandemi-19 ini dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya.

Ya Allah ya Alim Ya Nasir semoga arwah saudara-saudara kami yang gugur karena virus covid 19 khususnya kepada para dokter perawat dan petugas kesehatan untuk terima baik disisiMu jadikanlah mereka sebagai Syuhada sebagaimana yang disabdakan Rasul Muhammad *Shallallahu'alaihi Wa Salam* orang yang meninggal karena wabah penyakit menular adalah mati syahid gabungkanlah mereka semua bersama para syuhada yang gugur di Medan Perjuangan dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami.

Ya Allah ya Afuw Ya Ghofur ampunilah seluruh dosa-dosa dan kekeliruan kami para orang tua dan para Pemimpin kami jauhkanlah kami dan bangsa kami dari segala bentuk fitnah bencana dan petaka yang dapat menjadikan bangsa kami terpuruk.

Allahumma Arinal Haqqa Haqqa Warzuqnattiba'ah, Wa Arinal Bathila Bathila Warzuqnajtinabah Rabbana Atina Fiddunya Hasanah Wa Fil Akhiroti Hasanah Waqina 'Adzabannartiba Walhamdulillahirobbil Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

III. PENUTUP:

9. Pimpinan Sidang: DR. (HC) Puan Maharani (Ketua DPR RI)

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Prof. Dr. Nasaruddin Umar., M.A Imam besar Masjid Istiqlal yang telah membacakan doa. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan doa kita, amin.

Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Hadirin Sidang Dewan yang terhormat, dan seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan demikian, selesailah seluruh rangkaian acara sidang bersama DPR RI dan DPD RI hari ini. Kami

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas perhatian yang diberikan sehingga sidang ini dapat berlangsung dengan tertib dan lancar. Izinkanlah kami menutup sidang ini dengan ucapan *Alhamdulillahirabbilalamin*.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-75, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia.

MERDEKA!

Peserta Sidang: Merdeka!

Terima kasih. *Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Om Shanti Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya.*

Ketuk Palu 3X

Sidang Ditutup Pukul: 10:40 WIB

10. Pembawa Acara

Hadirin dimohon berdiri.

Lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi Ketua MPR RI, Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI, berkenan meninggalkan ruang rapat paripurna.